



KEPALA DESA NGORO-ORO KECAMATAN
PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA NGORO-ORO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO-ORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngoro-oro Tahun 2018-2024 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa Ngoro-oro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Ngoro-oro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGORO-ORO
DAN
KEPALA DESA NGORO-ORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Ngoro-oro.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Ngoro-oro dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngoro-oro dibantu perangkat Desa Ngoro-oro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa Ngoro-oro yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa Ngoro-oro dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Ngoro-oro dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Ngoro-oro dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa (Musdes) adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.
13. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun ide pembangunan manusia.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dengan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di desa guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu desa dalam jangka waktu tertentu.
17. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun atau periode masa jabatan Kepala Desa, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan desa, kebijakan umum dan program kegiatan.

18. RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat;
21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif;
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024 adalah sebagaimana yang tersebut di dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Penjabaran dan pelaksanaan RPJM-Desa ini disusun setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
- (3) Masa pemerintahan Kepala Desa setelah tahun 2024 berkewajiban untuk menyusun RPJM-Desa periode berikutnya.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 25 Maret 2019
KEPALA DESA NGORO-ORO,

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 25 Maret 2019
SEKRETARIS DESA NGORO-ORO,

ttd

DALYUNI

LEMBARAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2019 NOMOR ..2..

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	9
A.	Latar Belakang	9
B.	Maksud dan Tujuan	9
C.	Hubungan RPJM-Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
D.	Sistematik Penulisan RPJM-Desa	10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	12
A.	Kondidi Geografi	12
B.	Perekonomian Desa	13
C.	Sosial Budaya Desa	14
D.	Prasarana dan Sarana Desa	23
BAB III	VISI DAN MISI	24
A.	Filosofi	24
B.	Visi	25
C.	Misi	25
BAB IV	POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	29
A.	Potensi	29
B.	Masalah	35
C.	Strategi	38
BAB V	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
A.	Arah Pengelolaan Keuangan Desa	41
B.	Arah Pengelolaan Belanja Desa	42
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	43
A.	Strategi Kebijakan	43
B.	Program dan Kegiatan Pembangunan	45
BAB VII	PENUTUP	46
A.	Program	46
B.	Kaidah Pelaksanaan	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai data perencanaan 6 (enam) tahunan, RPJM-Desa berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Desa perlu menyusun data rencana pembangunan jangka menengah. Dalam Penyusunan data perencanaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan keterpaduan antara pembangunan di desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 yang berfungsi sebagai data perencanaan periode 6 (enam) tahun periode jabatan Kepala Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pula bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan yang menjadi arah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sangat diperlukan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan. RKP-Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dengan memuat indikasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, atau swadaya serta pembiayaan lainya seperti hibah dan program lain.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM-Desa ialah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keselarasan serta menyelaraskan program-program pembangunan di desa, sedangkan tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berkala;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya;
3. Menyajikan gambaran kondisi umum desa sekarang serta memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;

4. Memudahkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara tepat, terarah dan terukur.
- C. Hubungan RPJM-Desa dengan Dokumem Perencanaan Lainnya
1. Hubungan RPJM-Desa dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul
 RPJM-Desa Ngoro-oro ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
 2. Hubungan RPJM-Desa dengan RKP-Desa
 Data RPJM-Desa yang disusun untuk perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun yaitu tahun 2018 – 2024, ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) setiap tahunnya. Apabila suatu program pembangunan belum bisa terlaksana pada tahun pertama maka untuk tahun berikutnya terus diprogramkan hingga terealisasi. Dengan RPJM-Desa ini pula arah pembangunan untuk setiap tahunnya menjadi pasti. Begitu pula angka sumber pembiayaan dapat diarahkan untuk terlaksananya rencana pembangunan tersebut secara lebih tepat dan efisien.
 3. Sistematika Penulisan RPJM-Desa
 Sistematika penulisan RPJM-Desa Ngoro-oro Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Hubungan RPJM-Desa dengan data Perencanaan lainnya
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - A. Kondisi Geografi
 - B. Perekonomian Desa
 - C. Sosial Budaya Desa
 - D. Prasarana dan Sarana Desa
 - BAB III VISI DAN MISI
 - A. Filosofi
 - B. Visi
 - C. Misi
 - BAB IV POTENSI, MASALAH, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
 - A. Potensi
 - B. Masalah
 - C. Strategi
 - BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Arah Pengelolaan Keuangan Desa
 - B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

BAB VI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Strategi Kebijakan

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

BAB VII PENUTUP

A. Program

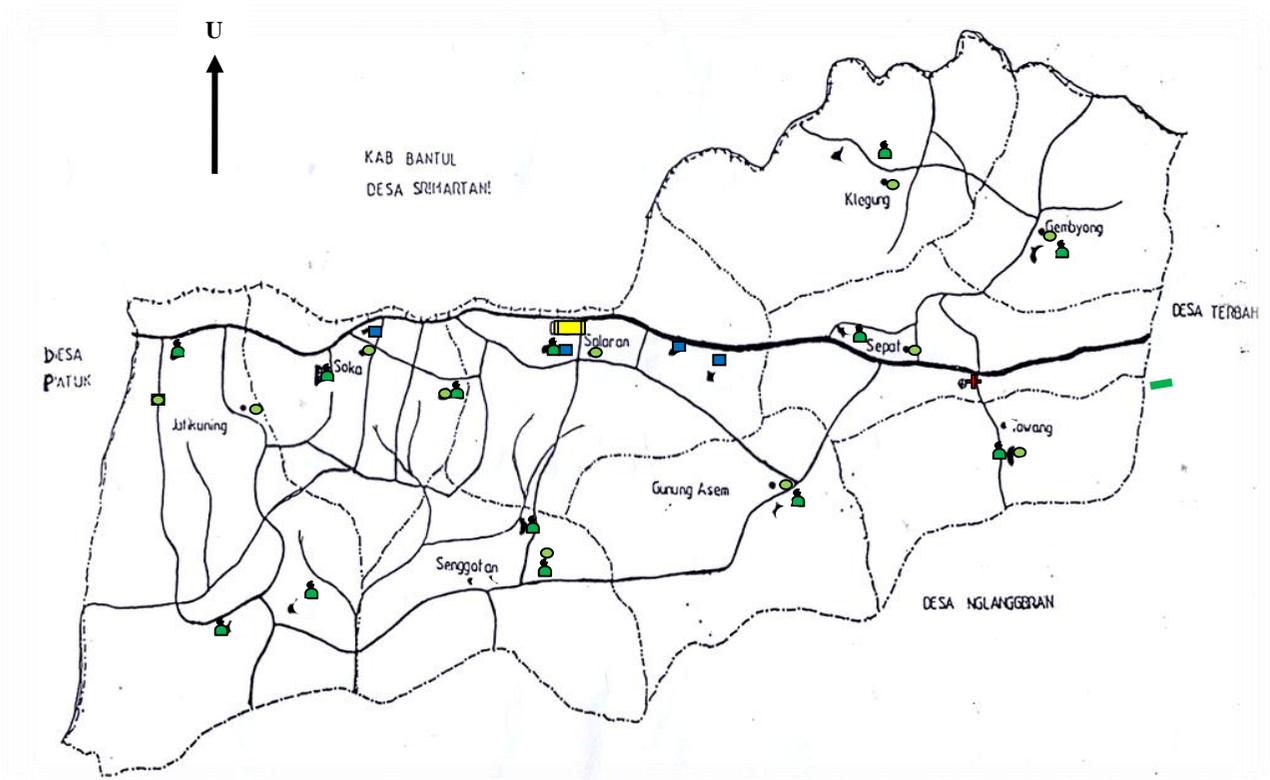
B. Kaidah Pelaksanaan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Kondisi Geografi

Desa Ngoro-oro adalah salah satu desa yang secara administratif berada di Wilayah Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Ngoro-oro terletak disebelah Utara Kota Kecamatan Patuk, jarak Desa Ngoro-oro dengan ibukota Kecamatan kurang lebih 7 km. dan 25 km dari ibukota Kabupaten Gunungkidul.

PETA WILAYAH



KETERANGAN :

- : Balai Desa
- : Balai Padukuhan
- : Puskesmas
- : Sekolahan
- : Masjid
- : Jalan Kabupaten
- : Jalan Desa
- : Batas Kabupaten
- : Batas Desa
- : Batas Padukuhan

Batas Wilayah Desa Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bantul/Sleman
- Sebelah Selatan : Desa Nglangeran
- Sebelah Barat : Desa Patuk
- Sebelah Timur : Desa Terbah

Kondisi topografis Desa Ngoro-oro secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Ketinggian tanah 700 m di atas permukaan laut.
- Kondisi tanah adalah lereng berbukit-bukit dengan jenis tanah

- Banyaknya curah hujan per tahun 7,762 mm/tahun dengan jumlah rata-rata 80 hari; bulan basah berkisar antara 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan; musim hujan dimulai sekitar bulan Oktober – Nopember dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya; puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari.
- Jumlah sungai di Desa Ngoro-oro ada 2 buah yang berada di Padukuhan Senggotan dan Padukuhan Klegung. Sumber air di Desa Ngoro-oro adalah di Padukuhan Senggotan, Sepat dan Klegung.

B. Perekonomian Desa

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Desa Ngoro-oro cukup beragam, mulai dari tanah persawahan hingga perbukitan dengan segala kekayaan alamnya. Keadaan potensi sumber daya alam Desa Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Ngoro-oro adalah sebagian besar lahan kering tadah hujan (95 %) yang tergantung pada iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif kecil dan sebagian besar sawah tadah hujan. Adapun rincian lahan pertanian Desa Ngoro-oro adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Luas (ha)
1	Sawah tadah hujan	253,4270
2	Ladang tegalan	329,7742
3	Pekarangan	139,0800
4	Hutan milik warga masyarakat	15,2343
5	Perikanan	0,0750
6	Tanah kritis/tandus	10,2500

Lahan sawah yang dapat ditanami padi 2 kali dalam satu tahun adalah seluas kurang lebih 4 ha. Lahan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan usaha tani padi-pala wija dengan pola tumpang sari.

2. Hutan

Hutan rakyat di Desa Ngoro-oro seluas kurang lebih 15,2343 ha yang berfungsi sebagai hutan produktif.

3. Flora dan fauna

Flora dan fauna yang ada di Wilayah Desa Ngoro-oro cukup beragam dan memiliki kekhasan ekosistem yang didominasi lahan kering dan perbukitan.

Flora yang dapat dijumpai di Wilayah Desa Ngoro-oro dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan.

Tanaman musiman antara lain meliputi padi (sawah dan gogo), palawija (jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu dan bermacam-macam polo pendem), serta sayur-sayuran (bayam, lombok, tomat dsb). Tanaman tahunan antara lain meliputi tanaman buah-buahan (mlinjo, pisang, durian, rambutan, mangga, kelapa dan kakao) serta kayu-kayuan (jati, sono keling, mahoni, sengon laut, sengon jowo dan bambu).

Fauna darat dan udara yang ada di Wilayah Desa Ngoro-oro pada saat ini antara lain burung emprit, kutilang, ayam, ular dsb)

Fauna air yang ada adalah lele, mujair, wader, gabus dsb. Selain itu terdapat jenis populasi ternak yaitu sapi kurang lebih 1052 ekor, ayam kampung kurang lebih 3205 ekor, bebek 49 ekor, mentok 60 ekor, kambing kurang lebih 785 ekor, angsa kurang lebih 53 ekor.

4. Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan menengah yang ada di Wilayah Desa Ngoro-oro kurang lebih 153 pelaku usaha mikro kecil dan menengah terdiri dari kelompok dan individu. Jenis usahanya terdiri dari pengolahan kayu, bambu, kerajinan kulit, konfeksi dan makanan olahan. Industri mikro kecil dan menengah ini berbasis pada hasil pertanian dan hasil hutan.

C. Sosial Budaya Desa

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Ngoro-oro pada akhir tahun 2018 adalah 3661 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga 1085 KK. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, penduduk Desa Ngoro-oro menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	1.775
2	Perempuan	1.886
	Jumlah	3.661

Data penduduk berdasarkan kelompok umur, sebagai berikut :

No	Padukuhan	0-5 Tahun	6-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	< 18 Tahun	Jumlah
1	TAWANG	20	18	18	10	193	260
2	SEPAT	18	17	17	11	246	309
3	GEMBYONG	25	22	22	10	200	279
4	KLEGUNG	14	16	16	8	188	242
5	GUNUNGASEM	21	30	31	13	281	376
6	SALARAN	32	33	35	16	359	475
7	SENGGOTAN	15	20	20	9	227	291
8	SOKA	46	45	48	18	534	691
9	JATIKUNING	42	57	68	23	566	736
	JUMLAH	234	258	275	118	2.794	3.661

Data tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2018 di Desa Ngoro-oro adalah sebagai berikut:

No	Pedukuhan	Tingkat Kesejahteraan					Jumlah
		Pra PKS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	
1	TAWANG	-	14	42	12	1	69
2	SEPAT	2	20	49	15	2	88
3	GEMBYONG	-	26	44	8	2	80
4	KLEGUNG	1	27	44	6	2	80
5	GUNUNGASEM	5	40	52	5	2	104
6	SALARAN	2	27	99	8	3	139
7	SENGGOTAN	-	9	75	8	3	95
8	SOKA	4	46	134	10	5	199
9	JATIKUNING	5	67	143	11	5	231
	JUMLAH	19	276	682	83	25	1.085

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa berjumlah 19 orang, yang terdiri dari : 1 Sekretaris Desa 3 Kepala Seksi, 3 Kepala Urusan 9 Dukuh dan 3 Staf Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perangkat	Jabatan	Pendidikan
1	SUKASTO	Kepala Desa	SLTA
2	DALYUNI	Sekretaris Desa	SLTA
3	JUMANI	Kasi. Pemerintahan	Diploma
4	SUPRIYANA	Kasi. Kesejahteraan	SLTA
5	PARYOTO	Kasi. Pelayanan	SLTA
6	ANGGUN MERIDIANA	Kaur. Tata Usaha dan Umum	Sarjana
7	SUNARTO	Kaur. Keuangan	SLTA
8	PANUT	Kaur. Perencanaan	SLTA
9	SUPRIHATIN	Dukuh Tawang	SLTA
10	RUKMINI	Dukuh Sepat	SLTP
11	GIMIN	Dukuh Gembyong	SLTP
12	MARYOTO	Dukuh Klegung	SLTA
13	IKA WIHAYANTO	Dukuh Gunungasem	SLTA
14	SURATMIRAH	Dukuh Salaran	SLTP
15	WIWIN ENDARWATI	Dukuh Senggotan	SLTA
16	KASWADI	Dukuh Soka	SLTA
17	MUNAWAR	Dukuh Jatikuning	SLTA
18	GIYANTO	Staf Kasi. Kesejahteraan	SLTA
19	PONIRAN	Staf Kasi. Pelayanan	SLTA
20	FERIYANTI	Staf Kaur. TU dan Umum	SLTA

Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 4 Kepala Bidang (Kabid) dan 4 anggota. Susunan BPD Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan
1	TUMIRAN	Ketua	Ketua RW
2	SOBARI	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
3	SURYA WIJAYA	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	DARMAWAN	Kabid Pemerintahan	Tokoh Agama
5	SURADI	Kabid Pembangunan	Tokoh Agama
6	JUMIRAH	Kabid Anggaran	Tokoh Masyarakat
7	SAIDAH	Kabid Kesra	Golongan Profesi
8	HERWANTO	Anggota	Golongan Profesi
9	TRİYANTA	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	SUMANTO	Anggota	Tokoh Agama
11	SANTOSO	Anggota	Ketua RW

3. Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdapat 6 (enam) lembaga yang wajib ada di desa, 5 (lima) lembaga dengan masa jabatan pengurusnya selama 6 (enam) tahun yaitu : LPMD, PKK, RW, RT dan LPMP dan 1 (satu) lembaga masa jabatan pengurusnya 3 (tiga) tahun yaitu Karang Taruna.

LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

LPMD merupakan salah satu dari 6 lembaga wajib yang harus ada di desa yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain itu tugas LPMD ialah menggerakkan dan menggali partisipasi aktif serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa. Keanggotaan dan kepengurusan LPMD Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	SUJIMAN	Ketua	Salaran
2	TARYONO	Wakil Ketua	Tawang
3	ALI NASHRUN	Sekretaris	Jatikuning
4	JUMARNO	Bendahara	Soka
5	SUKARDI	Koord.Sie.Praswil	Sepat
6	JIMAN	Anggota	Jatikuning
7	SUGIYONO	Anggota	Gembyong
8	SUWARDI	Koord.Sie.Perekonomian	Gunungasem
9	SAWITO	Anggota	Tawang
10	GIAN TO	Anggota	Gembyong
11	SUKARJO	Koord.Sie.Kamtib	Senggotan
12	NURWIYANTO	Anggota	Soka
13	TUKIJAN	Anggota	Gembyong
14	DWI NUR'AINI	Sie.Pembr. Perempuan	Jatikuning

15	WARTINI	Anggota	Sepat
16	UMI NURJANI	Anggota	Senggotan
17	SUBARJO	Sie.Pemuda dan ORKES	Gunugasem
18	WIDARYANTI	Anggota	Jatikuning
19	RIYANTO	Anggota	Klegung

Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMD Ngoro-oro antara lain:

1. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
2. Menggali swadaya murni masyarakat desa untuk mengimbangi bantuan.
3. Penyusunan perencanaan pembangunan melalui forum musrenbangdesa.
4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa baik berupa kegiatan swakelola dan pembangunan swadaya murni masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.

PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)

Peran dan fungsi PKK dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan di pedesaan sangat penting. Sehingga kaum perempuan memiliki kedudukan dan peran yang setara dengan kaum laki-laki. Kegiatan PKK Desa Ngoro-oro selama ini melalui kegiatan PKK antara lain:

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Desa setiap tanggal 3.
- Posyandu di masing-masing pedukuhan.
- Pertemuan dengan kader rutin bulanan setiap tanggal 15.
- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti:
 - Kursus kesetaraan gender.
 - Seminar penanggulangan KDRT.
 - UU Perlindungan anak.
 - Kursus ketrampilan

Kepengurusan PKK Desa NGORO-ORO adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	SUMARNI	Ketua	Soka
2	SUGIYEM	Wakil Ketua	Sepat
3	WIJI SUHARTI	Sekretaris I	Soka
4	BEKTININGSIH	Sekretaris II	Salaran
5	WAGIYEM	Bendahara I	Soka
6	SUPRAPTI	Bendahara II	Gunungasem
7	SRI LESTARI	Koordinator Pokja I	Salaran
8	SUWARNI	Anggota	Gunungasem
9	YANTIYEM	Anggota	Soka
10	ROKHANA	Anggota	Tawang
11	SUMARMI	Koordinator Pokja II	Sepat
12	SUKARMI	Anggota	Klegung

13	YUNI SUMARSIH	Anggota	Gembyong
14	MURSIDAH	Anggota	Klegung
15	SUMIYATI	Koordinator Pokja III	Senggotan
16	PUJI LESTARI	Anggota	Soka
17	SUTARTI	Anggota	Klegung
18	TRI HASTUTI	Anggota	Sepat
19	SITI KURNIASIH	Koordinator Pokja IV	Salaran
20	WIDAYATI	Anggota	Jatikuning
21	TRININGSIH	Anggota	Tawang
22	IKA PUSPITARINI	Anggota	Jatikuning

KARANG TARUNA

Peran dan fungsi karangtaruna dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum remaja dan pemuda di pedesaan sangat penting. Sehingga kaum remaja sebagai generasi muda calon penerus bangsa harus memiliki kegiatan, semangat dalam rangka pemberdayaan khususnya generasi muda. Kegiatan karangtaruna Persada Desa Ngoro-oro selama ini antara lain :

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Desa.
- Mengadakan pertemuan dengan karangtaruna sub Padukuhan.
- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti:
 - Pembinaan tentang bahaya narkoba
 - Pelatihan dan pendampingan TPA
 - Pendampingan dan Literasi
 - Pembinaan tentang hukum.

Kepengurusan Karang Taruna Desa Ngoro-oro Periode 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YATIMIN	Ketua	Salaran
2	APRIYANTO	Wakil Ketua	Senggotan
3	NUR TAUFIQ	Sekretaris	Gunungasem
4	SUGIYANTO	Wakil Sekretaris	Salaran
5	FAHRUDIN	Bendahara	Jatikuning
6	AGUS TRIYANTO	Wakil Bendahara	Sepat
7	SEPTI WIJIYANTI	Koord. Seksi Diklat	Jatikuning
8	SISKA NUR SARA	Anggota	Soka
9	RISA	Anggota	Klegung
10	TRI ENDARWATI	Anggota	Soka
11	FITRIANA DEWI	Anggota	Jatikuning
12	WALGIYANTO	Koord. Seksi Usaha Kesos	Soka
13	RIYANTO	Anggota	Klegung
14	RISTANTO	Anggota	Gembyong
15	EKO HARYONO	Anggota	Sepat
16	AGUS PRASETYO	Anggota	Tawang

17	SUMARNA	Koord. Seksi Kube	Soka
18	SUPRANOLO	Anggota	Klegung
19	YUDI UTOMO	Anggota	Senggotan
20	RIYANTO	Anggota	Jatikuning
21	SURADI	Anggota	Gunungasem
22	HERI SETYAWAN	Koord. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	Soka
23	TOTOK GIYONO	Anggota	Salaran
24	SUTOYO	Anggota	Tawang
25	GIYANTA	Anggota	Salaran
26	ALI NASRHUN	Koord. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya	Jatikuning
28	ELI SUHELI	Anggota	Salaran
29	ANDI SETIAWAN	Anggota	Jatikuning
30	ARIF BUDI P	Anggota	Gunungasem
31	SARJONO	Anggota	Salaran
32	AGUNG PRASETYO	Koord. Seksi Lingkungan Hidup	Tawang
33	NANANG PRASETYO	Anggota	Salaran
34	ADI RESTU DEFIKA	Anggota	Tawang
35	KUSDIYONO	Koord. Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan	Soka
36	SUTARTO	Anggota	Senggotan
37	SUBARDI	Anggota	Gunungasem

RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

RW dan RT merupakan salah satu dari lembaga wajib yang harus ada di desa yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembinaan kerukunan, ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungan wilayahnya serta penggerak swadaya dan gotong royong masyarakat.

Data personalia lembaga itu sebagai berikut :

Data RW dan RT Desa Ngoro-oro

No	Padukuhan	RT		RW	
		Nama	Ketua	Nama	Ketua
1	Tawang	NGADIRAN	001	SUHARDI	001
		ANDI SUTOYO	002		
		JITO	003		
		SAGIYO	004		
2	Sepat	PARLAN	005	HARTO WIYONO	002
		NGATIMIN	006		
		HAMID	007		

		JAYADI	008		
3	Gembyong	NGADIYO SATI NUR UTAMI YATNO UTOMO HARTO WYONO	009 010 011 012	SUGIYO	003
4	Klegung	SUGENG GUNADI	013 014	MARGONO	004
		ARIS ISTIAWAN SUSANTO	015 016		
6	Gunungasem	WIYONO TUKIMIN HADI PURWANTO KUWADI	017 018 019 020	SUBANI	005
6	Salaran	GIYANTA SUROTO HARYANTO SUPOMO	021 022 023 024	SUWARDI	006
7	Senggotan	TUKIMN KRISTINA D. NGADIRIN PURWANTO	025 026 027 028	HERI BAWA S.	007
8	Soka	SUTRIYONO SLAMET WASIMAN SUTRISNO EDI SUMARWAN SLAMET	029 030 031 032 033 034	SANIYO SUDARI	008 009
9	Jatikuning	SUWASNO SALIYO SAMADI SAGIRAN WIDODO PONIYO	035 036 037 038 039 040	WAGIYO ISSANA	010 011

LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan)

LPMD merupakan lembaga yang berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat Padukuhan.

Keanggotaan dan kepengurusan LPMP di Desa Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	JASWANTO	Tawang	Ketua
2	AGUS . S	Sepat	Ketua
3	WAGIRAN	Gembyong	Ketua

4	GIYO.S	Klegung	Ketua
6	PARYONO	G.n Asem	Ketua
6	SUHARDI	Salaran	Ketua
7	BADRI	Senggotan	Ketua
8	MUSIYO	Soka	Ketua
9	KAMIJO	Jatikuning	Ketua

4. Ketenagakerjaan

Dari seluruh jumlah penduduk Desa Ngoro-oro yang berjumlah 3.661 jiwa, yang usia produktif (15-56 tahun) berjumlah 1.737 jiwa atau 47% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	1.737 orang
2	Jumlah penduduk usia 15-56 tahun yang bekerja	1.510 orang
3	Jumlah penduduk usia 15-56 thn yang tdk bkerja	232 orang
4	Penddk wanita usia 18-56 thn menjd ibu rmh tangga	31 orang
5	Penduduk >15 tahun cacat sehnga tidak dapt bekerja	9 orang
6	Penduduk >15 tahun cacat dan bekerja	6 orang
7	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
	1) PNS	24 orang
	2) TNI/Polri	3 orang
	3) Kepala Desa/ Perangkat Desa	20 orang
	4) Petani/ Pekebun	1.166 orang
	5) Swasta	885 orang

5. Pendidikan

Perkiraan tentang angka penduduk Desa Ngoro-oro yang telah berhasil mengenyam/lulus pendidikan sekolah formal hingga tahun 2018 ialah sebagai berikut :

No	Padukuhan	Buta Huruf	Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	D I	D II	D III	S 1	S 2	Jumlah
1	TAWANG	-	15	80	53	48	-	1	2	3	-	202
2	SEPAT	1	13	81	72	57	-	1	2	5	-	232
3	GEMBYONG	1	21	75	61	59	-	1	2	1	-	221
4	KLEGUNG	-	19	65	59	63	1	2	1	2	-	212
5	GUNUNGASEM	4	26	90	85	59	2	2	1	5	-	274
6	SALARAN	2	38	111	134	77	1	3	3	8	-	377
7	SENGGOTAN	1	21	82	73	69	2	-	3	2	-	253

8	SOKA	3	45	209	309	109	3	2	4	9	1	694
9	JATIKUNING	3	53	231	297	99	3	5	5	9	1	706
	JUMLAH	15	251	1.024	1.143	640	12	17	23	44	2	3.171

Prasarana pendidikan yang ada di Desa Ngoro-oro terdiri dari PAUD jumlah 2, Taman Kanak-kanak (TK) jumlah 1, Sekolah Dasar (SD) jumlah 2, SMP jumlah 1 dan SLB jumlah 1.

6. Kesehatan

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat dimasyarakat Desa Ngoro-oro dapat diukur dari berbagai indikator dan tercermin dalam meningkatnya kesehatan masyarakat. Data tentang kesehatan masyarakat Desa Ngoro-oro antara lain sebagai berikut :

No	Indikator Kesehatan	Angka
1	Kematian bayi	Tidak ada
2	Kematian kasar	Tidak ada
3	Penderita Anemia ibu hamil	Tidak ada
4	Penderita Anemia balita	Tidak ada
5	Penderita kurang energi kronis	Tidak ada
6	Status gizi masyarakat di Desa	Cukup

7. Peribadatan

Dari jumlah penduduk Desa Ngoro-oro berjumlah 3.661 jiwa semua beragama Islam, data prasarana ibadah yang ada dengan rincian sebagai berikut :

No	Prasarana Ibadah/Masjid	Alamat	Ketua Takmir
1	UTAMA JATI	Jatikuning	Sutarjo, MA
2	AL HAJAR ASWAD	Jatikuning	Wagiyo
3	MUTAQIN	Jatikuning	Santoso
4	QUATUL ISLAM	Soka	Mardi Tugiman
5	AL AMIN	Soka	Sumardi
6	AL HUDA	Senggotan	Nur Syahid
7	AL HIDAYAH	Senggotan	Paijan
8	BAITUL KHIKMAH	Salaran	Mutaqo
9	MIFTAHUN NUR	Gunungasem	Maksum
10	AL MUHTADIN	Klegung	Saidah
11	MIFTAHUL JANNAH	Klegung	Durohman
12	AL MUFID	Gembyong	Muryadi
13	SYAKIRIN	Sepat	Rubimin
14	AL BAROKAH	Tawang	Andi Sutaya N.
15	BAITUL IZZA	Jatikuning	Yatmorejo
	MUSHOLA		
1	DARUL MUTTAQIN	Salaran	Ponijan
2	AL IKHLAS	Gembyong	Muryadi

D. Prasarana dan Sarana Desa

1. Transportasi, Jalan, Jembatan

Prasarana Transportasi yang ada di Desa Ngoro-oro jalan Kabupaten dan jalan Desa serta jalan Padukuhan (lingkungan) yang menghubungkan antara Desa Patuk, Terbah, Nglanggeran serta jalan antar Padukuhan di Wilayah Desa Ngoro-oro, dan panjang jalan Kabupaten kurang lebih 8 km dan panjang jalan desa 30,672 km aspal kurang lebih 9,791 km, panjang jalan rabat kurang lebih 16,767 km, panjang jalan perkerasan batu kurang lebih 1,200 km serta panjang jalan tanah kurang lebih 2,914 km.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yaitu :

Kepala Desa sebagai pimpinan, dibantu Perangkat Desa yang terdiri :

1. Sekretariat yang dikepalai Sekretaris Desa, yang membawahi :

- 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
- 2) Urusan Keuangan;
- 3) Urusan Perencanaan;

2. Pelaksana teknis yang terdiri dari :

- 1) Seksi Pemerintahan;
- 2) Seksi Kesejahteraan;
- 3) Seksi Pelayanan;

3. Unsur Wilayah terdiri dari : Dukuh

4. Staf Perangkat Desa.

3. Sarana Kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan di Desa Ngoro-oro telah terbentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap Padukuhan yang siap setiap saat dapat memberikan informasi dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang selalu siap dalam melayani/membantu masyarakat serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

BAB III VISI DAN MISI

A. Filosofi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memerlukan satu filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki pandangan luas dan dapat menjadi pedoman dan tujuan bagi Desa dalam menetapkan Visi dan Misi serta tujuan pembangunan.

Filosofi pembangunan Desa Ngoro-oro merangkum filosofi daerah Kabupaten Gunungkidul yang digali dari khasanah budaya luhur bangsa Indonesia, yaitu DHAKSINARGA BHUMIKARTA. *Dhaksinarga* berasal dari kata-kata *Dhaksina* yang berarti “Selatan” dan *Arga* yang berarti “Gunung”, yang kemudian dirangkai menjadi satu kata *Dhaksinarga* yang artinya Gunungkidul. *Bhumikarta* berasal dari kata-kata *Bhumi* yang bermakna “bumi, tanah, daerah” dan *Karta* yang bermakna “Subur, makmur, rahayu, damai dan sejahtera”.

Dengan demikian filosofi pembangua Kabupaen Gunungkidul, DHAKSINARGA BUMIKARTA, merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan suatu semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur dan makmur dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang berlandaskan Hasta Dharma.

Adapun Hasta Dharma merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

- (1) Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan golongan aliran dan agama,
- (2) Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum,
- (3) Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin,
- (4) Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif dan korektif,
- (5) Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju kearah kesejahteraan masyarakat,
- (6) Bersifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana agar dapat menampung dan mencarikan penjelasan segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari,
- (7) Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, dan
- (8) Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil, dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan di dalam kebaikan lahir, batin bagi masyarakat.

B. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024 mengadopsi visi Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngoro-oro 2018 yang telah diperbarui, yaitu :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Desa Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

C. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi desa tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Desa 2018 – 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa secara terbuka dan menyeluruh.
- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan perangkat desa untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi SDM Perangkat Desa dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan desa supaya tercipta sinergi antara pemerintah desa dengan kelembagaan desa yang ada.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umum dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif

pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksploitasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Desa Ngoro-oro sebagai berikut :

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perangkat Desa yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi 3. Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Ngoro-oro
2	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa secara terbuka dan menyeluruh	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa
3	Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
4	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat

5	Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat
6	Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya 2. Mewujudkan masyarakat agamis
7	Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

BAB IV
POTENSI, MASALAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Gambaran umum kondisi Desa Ngoro-oro berdasarkan hasil pengkajian Desa secara partisipatif, secara rinci telah diperoleh informasi tentang potensi-potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa Ngoro-oro. Adapun program pembangunan yang dilakukan selama ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjawab tantangan atau masalah-masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Ngoro-oro.

A. Potensi

Potensi-potensi sumber daya alam, sosial, maupun manusia secara umum yang ada di Desa Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Desa Ngoro-oro 753,7909 ha atau 7,539 km²
2. Jumlah Penduduk tahun 2018 sejumlah 3.661 jiwa, dengan persentase penduduk usia produktif (15 – 59 th) berjumlah 47 % (1.737) yang merupakan potensi tenaga kerja.
3. Potensi pertanian termasuk di dalamnya peternakan, perikanan darat dan perkebunan.
4. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan kayu serta pengolahan hasil pertanian yang berbentuk makanan olahan.
5. Letak wilayah yang sangat indah untuk dikembangkan menjadi obyek wisata.
6. Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan hidup hemat.

Disamping itu hasil pengkajian desa secara partisipatif menunjukkan informasi tentang potensi-potensi Desa Ngoro-oro yang lebih rinci sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN POTENSI
1. Transaksi/Jelajah Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padukuhan Senggotan, Gunungasem, Sepat, Gembyong dan Tawang terdapat sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 2. Di lima padukuhan tersebut sebagian sawahnya masih dapat ditanami 2 kali dalam satu tahun. 3. Dan sebagian besar masih menggunakan sistem tadah hujan. 4. Disamping itu para petani menanam rumput kolonjono/gajah di galengan untuk pakan ternak dan pada musim kemarau sawah-sawah sebagian besar ditanami kacang hijau dan sayur-sayuran. 5. Untuk ladang/tegalan dimanfaatkan para

	<p>petani untuk ditanami ketela dan palawija yang sesuai dengan keadaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dilingkungan rumah pekarangan ditanami coklat yang hasilnya cukup memuaskan para petani. 7. Desa Ngoro-oro juga ada hutan rakyat yang dimiliki oleh individu yang ditanami pohon jati, sengon laut, sono keling, akasia, jambu mete juga terdapat beberapa hewan. 8. Hasil dari hutan rakyat tersebut digunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari serta dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga dan kayu bakar. 9. Jalan yang menghubungkan antar padukuhan sebagian besar telah diperkeras (aspal, rabat beton dan batu). Namun pada saat ini jalan aspal kebanyakan sudah rusak yang perlu rehab. 10. Pada musim kemarau sebagian masyarakat menggunakan sumber mata air khususnya di 5 padukuhan dan 4 padukuhan kebanyakan membeli untuk kebutuhan sehari-hari; tahun 2015 di padukuhan Jatikuning dibangun sumur bur dalam, sekarang kebutuhan akan air hamper 80% tercukupi dan di tahun 2017 di Padukuhan Soka dibangun sumur bur dalam, pada saat sekarang masih dalam upaya memaksimalkan pemanfaatannya untuk kebutuhan masyarakat Soka. 11. Sebagian besar penduduk Desa Ngoro-oro bermata pencaharian sebagai petani yang sebagian kecil sebagai buruh tani dan bangunan, pedagang arang dan kayu bakar. 12. Tingkat pendidikan warga Desa Ngoro-oro kebanyakan adalah SD dan SLTP. 13. Disamping pertanian, sebagian penduduk beternak sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. 14. Prasarana pendidikan formal adalah 2 SD Negeri yaitu SD Ngoro-oro dan SD Soka serta SMP N 4 Patuk di Ngoro-oro. 15. Prasarana Ekonomi terdapat pasar yang berada di Padukuhan Tawang yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
--	--

	<p>16. Sarana Kesehatan terdapat Puskesmas Patuk II di Padukuhan Tawang, dan yang akan terwujud segera adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Type D didekat puskesmas.</p>
<p>2. Kalender Musim</p>	<p><i>Musim Kemarau (bulan Mei – Nopember)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan pupuk kandang (kompos) 2. Petani membuat arang untuk kebutuhan sehari-hari 3. Tenaga kerja keluar daerah untuk menambah penghasilan 4. Petani menjual kayu bakar 5. Petani menjual hail bumi seperti ketela dan pisang 6. Petani menjual sayur-sayuran 7. Petani menjual buah-buahan dsb. <p><i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani persiapan lahan pertanian 2. Petani mulai menanam jagung, kacang, ketela dan padi 3. Petani mulai pemupukan tanaman pertanian 4. Petani menuai hasil pertaniannya 5. Petani menyetok hasil pertaniannya. 6. Buruh tani berkonsentrasi dalam mengerjakan pertaniannya.
<p>3. Peta Sketsa Desa</p>	<p><i>Padukuhan Tawang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air berasal dari belik dan penampungan air hujan 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam. 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 7. Mata Pencaharian kebanyakan petani dan ada pedagang, PNS. 8. Jumlah Penduduk : 260 jiwa dan terdiri dari 69 KK. <p><i>Padukuhan Sepat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air dari sumber mata air yang dialirkan menggunakan pompa air dan dari sumur bur

2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
3. Buah-buahan terdapat rambutan, petai dan manga
4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll)
5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian kebanyakan adalah petani dan sebagian kecil pedagang dan ada Polri
8. Jumlah Penduduk : 309 jiwa dan terdiri dari 88 KK

Padukuhan Gembyong

1. Sumber air dari sumber mata air yang dapat dialirkan tanpa menggunakan pompa air (grafitasi)
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
3. Buah-buahan terdapat rambutan
4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas dll)
5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian kebanyakan petani, sebagian kecil pedagang dan ada TNI
8. Jumlah Penduduk : 269 jiwa dan terdiri dari 88 KK

Padukuhan Klegung

1. Sumber air dari sumber mata air dan sumur
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
2. Buah-buahan terdapat rambutan dan manga
3. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll)
4. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing
5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang

	<p>6. Mata pencaharian adalah petani dan pedagang ada TNI</p> <p>7. Jumlah Penduduk : 242 jiwa dan terdiri dari 80 KK</p> <p><i>Padukuhan Gunungasem</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber mata air dari sumber mata air yang dialirkan menggunakan pompa air serta PAH. 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam ras 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 7. Mata pencaharian adalah petani dan pedagang 8. Jumlah Penduduk : 376 jiwa dan terdiri dari 104 KK <p><i>Padukuhan Salaran</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber air dari sumber mata air dan belik, sumur bur, PAH dan sebagian beli 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ikan air tawar 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 7. Tanaman Kakao (coklat) 8. Mata pencaharian adalah petani, pegawai swasta, sopir, buruh 9. Jumlah Penduduk : 469 jiwa dan terdiri dari 139 KK <p><i>Padukuhan Senggotan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber mata air dari sumber mata air yang dapat dialirkan tanpa menggunakan pompa air (grafitasi) dan menggunakan pompa. 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman
--	--

keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)

3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian
4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit dll)
5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian adalah petani dan merantau keluar daerah
8. Jumlah Penduduk : 291 jiwa dan terdiri dari 95 KK

Padukuhan Soka

1. Sumber mata air dari sumber mata air belik, sumur, PAH, sumur bur dan sebagian beli
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian
4. Tanaman kakao (coklat)
5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing, ayam ras dan ikan air tawar
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian sebagian petani dan buruh serta PNS
8. Jumlah Penduduk : 691 jiwa dan terdiri dari 199 KK

Padukuhan Jatikuning

1. Sumber mata air dari sumber, belik, sumur, PAH dan sumur bur
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian
4. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam ras
5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
6. Mata pencaharian petani, buruh, pedagang dan pegawai swasta/PNS
7. Jumlah Penduduk : 758 jiwa dan terdiri dari 231 KK

4. Bagan Kelembagaan	1. Desa Ngoro-oro organisasi/lembaga yang aktif dan mempunyai peran terhadap masyarakat adalah RT/RW, LPMP, LPMD, PKK, Karang Taruna, LINMAS beserta Pemerintah Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
----------------------	--

B. Masalah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Ngoro-oro yang perlu ditangani segera adalah sebagai berikut :

1. Dari 295 Keluarga Pra KS dan KS I yang perlu penanganan serius untuk pengentasan kemiskinan.
2. Air bersih, yang pada musin kemarau masih kesulitan air juga perlu penanganan yang tidak kalah pentingnya.
3. Lahan persawahan yang menggantungkan pada curah hujan.
4. Pakan ternak yang pada musim kemarau sangat sulit perlu ada solusi.
5. Perikanan darat juga perlu adanya pemecahan untuk meningkatnya budi daya ikan.
6. Tingkat Pendidikan yang masih perlu peningkatan sarana dan prasarana serta penyadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan.
7. Prasarana infrastruktur terutama jalan-jalan yang masih banyak yang rusak perlu bantuan dan penanganan yang segera dilakukan.
8. Pertanahan yang masih banyak belum bersertifikat sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk meringankan biaya pensertifikatan.
9. Kamtibmas perlu adanya penanganan, terutama LINMAS yang kemampuannya kurang maksimal/ profesional.
10. Sampah rumah tangga yang semakin hari semakin sulit ter tangani, karena pola hidup masyarakat yang semakin banyak bergantung pada produk yang sulit untuk di daur ulang dan kesadaran menjaga lingkungan yang semakin hari semakin rendah.

Disamping itu hasil pengkajian desa secara partisipatif menunjukkan informasi tentang masalah-masalah yang ada di Wialayah Desa Ngoro-oro dengan rincian sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN MASALAH
1. Jelajah Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih hampir disemua padukuhan pada musim kemarau masih banyak warga yang kurang, sehingga harus beli/minta bantuan. 2. Persawahan di musim kemarau kebanyakan kering tidak dapat ditanami karena tidak ada irigasi dan sungai kering. 3. Kesuburan tanah sawah maupun ladang menurun setelah petani menggunakan pupuk kimia. 4. Hama tanaman seperti tikus, wereng, walang,

	<p>sundep dan ulat menjadi tantangan para petani.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Hutan rakyat juga banyak kendala dengan adanya hama seperti ulat, tupai, jamur kayu beracun (tajin, upas, dipo). 6. Peternakan juga banyak tantangan karena hama ces (mulut berair) bagi peternak ayam buras. 7. Jalan-jalan aspal ditiap padukuhan banyak yang sudah rusak. 8. Jalan masuk kerumah-rumah /gang masuk banyak tanah sehingga pada musim hujan jalan becek. 9. Pasar desa yang belum maksimal dari segi sarana dan prasarana serta aktifitas perdagangan yang terbatas dan tidak setiap hari sehingga para petani untuk menjual hasil pertanian harus ke pasar yang cukup jauh. 10. Peternakan ayam ras juga menimbulkan masalah karena mengakibatkan bau yang tidak sedap juga lalat. 11. Batas tanah banyak masalah karena belum semuanya disertifikat.
<p>2. Peta Sketsa Desa</p>	<p><i>Padukuhan Tawang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air berkurang pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan <p><i>Padukuhan Sepat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sawah kebanyakan kering pada musim kemarau 2. Tanah padas putih 3. Kurangnya lapangan kerja 4. SDM rendah 5. Kurangnya sumber pakan ternak pada musim kemarau <p><i>Padukuhan Gembyong</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanahnya berbukit 2. Banyak batu-batu besar 3. Kurangnya lapangan kerja 4. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 5. SDM rendah

	<p>6. Ancaman tanah longsor <i>Padukuhan Klegung</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan <p><i>Padukuhan Gunungasem</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan <p><i>Padukuhan Salaran</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air berkurang pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan <p><i>Padukuhan Senggotan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanahnya berbukit 2. Banyak batu-batu besar 3. Kurangnya lapangan kerja 4. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 5. SDM rendah 6. Ancaman tanah longsor dan kekeringan <p><i>Padukuhan Soka</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan air pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
--	---

	<p><i>Padukuhan Jatikuning</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan air pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
3. Kalender Musim	<p><i>Musim Kemarau (bulan Mei – Nopember)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan air 2. Harga jual ketela rendah 3. Kekurangan pakan ternak 4. Harga jual ternak murah 5. Harga jual buah-buahan murah dsb. <p><i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga benih mahal 2. Pupuk sulit didapat dan harganya mahal 3. Penjualan hasil pertanian murah 4. Sulit mengeringkan hasil panen 5. Transportasi hasil panen sulit
4. Bagan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPD dirasa kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas 2. Karang Taruna tingkat Desa belum optimal dalam perannya sebagai wadah generasi muda. 3. Keberadaan LPMD dan LPMP juga belum berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 4. RW dirasakan tidak ada fungsinya karena perannya sama dengan Dukuh.

Peluang yang sangat besar untuk mengurangi permasalahan di Desa Ngoro-oro adalah :

1. Peran serta masyarakat dan kesadarannya dalam bergotong-royong dan berswadaya masih tinggi sehingga dalam melaksanakan pembangunan di tingkat RT, Padukuhan maupun Desa sangat baik.
2. Kerja sama antara Pemerintah Desa dengan lembaga yang ada cukup harmonis.
3. Partisipasi Perusahaan yang ada di Wilayah Desa Ngoro-oro cukup mendukung dalam melaksanakan program pembangunan.

C. Strategi

Strategi merupakan tujuan umum, sasaran dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta berpikir yang melatar belakangi upaya-upaya pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan mengedepankan potensi.

Berdasarkan Misi dan Tujuan di atas, strategi-strategi RPJM-Desa Ngoro-oro berikut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program sesuai dengan kemampuan desa, serta memanfaatkan program Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat maupun pihak-pihak lain yang berkomitmen terhadap pembangunan Desa Ngoro-oro.

Berikut adalah penjabaran Tujuan menjadi Strategi-strategi Pembangunan :

TUJUAN – STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
A	MISI KESATU	STRATEGI
1	Mewujudkan perangkat Desa yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing	1. Meningkatkan pemahaman akan tupoksi perangkat desa 2. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kemampuan keuangan Desa
3	Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Ngoro-oro	Mengoptimalkan potensi dan kemampuan lembaga-lembaga yang ada di desa
B	MISI KEDUA	
1	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa	Mengoptimalkan jalinan komunikasi
C	MISI KETIGA	
1	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal	1. Mengoptimalkan waktu pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi
D	MISI KEEMPAT	
	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat	1. Pemberantasan buta aksara 2. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat

E	MISI KELIMA	
	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi masyarakat yang bisa dikembangkan 2. Pendampingan terhadap usaha masyarakat dalam bentuk usaha mandiri/home industri 3. Pendampingan terhadap usaha masyarakat dalam bentuk kelompok usaha 4. Penerapan teknologi tepat guna 5. Pengembangan jaringan pasar
F	MISI KEENAM	
1	Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya	Pembinaan seni dan budaya masyarakat lokal desa
2	Mewujudkan masyarakat agamis	Meningkatnya perilaku pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat lebih agamis
G	MISI KETUJU	
1	Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas SDM pengelola
2	Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata 2. Membuka atau mengembangkan daerah wisata baru 3. Membuka peluang kerja sama dengan pihak lain / swasta 4. Pengemasan atraksi dan paket wisata 5. Menciptakan rasa nyaman, aman, tertib dan kondusif

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah upaya Pemerintah Desa dalam peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Desa, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, serta menumbuhkembangkan semangat masyarakat dalam membangun.

A. Arah Pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber-sumber penerimaan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan transfer berupa Dana Desa droping APBN, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Propinsi, serta Pendapatan Lain-lain berupa bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, bunga bank, hadiah lomba lunas PBB, hadiah lomba dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Dana Desa droping APBN adalah penerimaan dari pemerintah pusat yang penggunaannya 100% hanya digunakan untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan penyertaan modal desa yang mulai tahun 2018 penggunaan dana tersebut dengan semangat/sistem Padat Karya Tunai di Desa (PKTD).

Pengelolaan penerimaan desa dilakukan secara cermat, transparan dan akuntabel, dalam rangka peningkatan penerimaan desa perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan desa. Apabila pengelolaan penerimaan dan pembelanjaan tidak dilakukan secara transparan, maka akan menimbulkan masalah hukum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat masih memerlukan anggaran ADD, Bantuan Pemerintah dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Desa belum optimal karena usaha-usaha desa dan pengelolaan asset belum dilaksanakan secara maksimal, walaupun dari Pemerintah Desa sudah berupaya mencari terobosan agar PAD lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya..

Pendapatan lain-lain pada setiap tahun hampir sama bahkan cenderung tidak setabil karena tergantung dari situasi dan keadaan perusahaan yang ada serta semangat pemerintah desa dan masyarakat untuk berprestasi dalam perlombaan yang ada dan diikuti, terutama kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan penggunaan ADD di Desa Ngoro-oro adalah sebagian besar untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan sebagian kecil untuk membiayai Pembangunan fisik.

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Sesuai dengan adanya otonomi daerah dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberi peluang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja desa merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran desa periode tahun anggaran tertentu. Pengalokasian Belanja Pembangunan Desa dilaksanakan antara lain dengan acuan/rumusan program-program pembangunan hasil MUSRENBANGDES, hasil rumusan dari aspirasi masyarakat dan Arah Kebijakan Pembangunan. Pembangunan diharapkan benar-benar realistis, transparan, partisipatif dan akuntabel serta mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Strategi Kebijakan

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program-program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan yang akan dicapai. Dengan demikian setelah disusun strategi maka selanjutnya harus dirumuskan kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi serta berlandaskan pada hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini dengan menyadari dan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu enam tahun masa jabatan Kepala Desa. Kebijakan merupakan rumusan keputusan yang digunakan untuk :

- (1) Menetapkan secara teliti tentang bagaimana program yang akan dilaksanakan
- (2) Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
- (3) Menciptakan kondisi dimana setiap pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya yang mendapat dukungan untuk mengimplementasikan keputusan.

Berdasarkan pemikiran tersebut disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi Desa Ngoro-oro, maka kebijakan-kebijakan pembangunan Desa Ngoro-oro tahun 2018 – 2024 adalah sebagai berikut :

STRATEGI-KEBIJAKAN

A	MISI KESATU	
NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan pemahaman akan tupoksi perangkat desa	Mengembangkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola pemerintahan
2	Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi	Mengembangkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan pemerintahan
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kemampuan keuangan Desa	Meningkatkan kemampuan perangkat desa tentang pembuatan laporan keuangan sesuai batas standar
4	Mengoptimalkan potensi dan kemampuan lembaga-lembaga yang ada di desa	Meningkatkan kemampuan dan pemahaman akan fungsi dari lembaga desa
B	MISI KEDUA	
1	Mengoptimalkan jalinan komunikasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas musyawarah

C	MISI KETIGA	
1	Mengoptimalkan waktu pelayanan kepada masyarakat	1. Memberikan layanan kepada masyarakat di kantor sesuai dengan jam dan hari kerja. 2. Pemberian layanan kepada masyarakat diluar jam kerja kantor
2	Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi	Mengembangkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan pemerintahan
D	MISI KEEMPAT	
1	Pemberantasan buta aksara	Menjalankan program pemerintah tentang pendidikan
2	Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat	Menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
E	MISI KELIMA	
1	Mengidentifikasi potensi masyarakat yang bisa dikembangkan	Mendorong minat masyarakat untuk berwira usaha
2	Pendampingan terhadap usaha masyarakat dalam bentuk usaha mandiri/home industri	Memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang manajemen usaha
3	Pendampingan terhadap usaha masyarakat dalam bentuk kelompok usaha	Memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang manajemen usaha
4	Penerapan teknologi tepat guna	Meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam pekerjaan
5	Pengembangan jaringan pasar	Meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam wilayah kegiatan
F	MISI KEENAM	
1	Pembinaan seni dan budaya masyarakat lokal desa	Mempertahankan tradisi adat pendahulu yang sesuai dengan peraturan yang ada
2	Meningkatnya perilaku pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat lebih agamis	Melaksanakan, memelihara dan mempertahankan ibadah sesuai dengan keyakinannya
G	MISI KETUJUH	
1	Meningkatkan kualitas SDM pengelola	Mengembangkan kemampuan pengelola dan pengurus dalam mengelola unit wisata

2	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di obyek wisata
3	Membuka atau mengembangkan daerah wisata baru	Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk membuka/membuat obyek wisata baru
4	Membuka peluang kerja sama dengan pihak lain / swasta	Memberi kesempatan investasi dengan pihak ketiga
5	Pengemasan atraksi dan paket wisata	Mengelola seni pertunjukan untuk pelestarian budaya dan wisatawan
6	Menciptakan rasa nyaman, aman, tertib dan kondusif	Memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan

B. Program dan Kegiatan Pembangunan

Kebijakan yang ditetapkan dijabarkan lebih lanjut melalui program-program yang sudah direncanakan untuk meneruskan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi. Dengan demikian program kegiatan merupakan suatu jenis rencana yang disusun secara lebih konkret dan terkandung berbagai jenis kegiatan untuk menuju misi yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Ngoro-oro tahun 2018 – 2024 yang merupakan penerjemahan dari Visi, Misi, Tujuan Strategi, dan Kebijakan pembangunan di atas dirumuskan dalam bentuk pembidangan seperti disajikan pada tabel berikut :

BAB VII PENUTUP

A. Program

RPJM-Desa ini memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum dan program pelayanan terhadap masyarakat serta RPJM-Desa ini juga merupakan arah kebijakan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas kegunaan dengan tidak mengesampingkan aspirasi dari masyarakat dan kesinambungan program, sehingga diharapkan RPJM-Desa ini juga memuat hal-hal yang menjadi rencana/program sebagai pedoman pembangunan selanjutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Tahap-tahap penyusunan RPJM-Desa ini berlangsung selama tiga bulan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Rancangan RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- 2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus membentuk tim penyusun RPJM-Desa.
- 3) Pengkajian keadaan Desa dan penyiapan Gambaran awal seperti Visi dan Misi Desa dalam pembangunan;
- 4) Penggalan usulan/gagasan program-program pembangunan di masing-masing Padukuhan melalui musyawarah padukuhan (Musdus) yang dihadiri oleh Dukuh, perangkat padukuhan, serta masing-masing perwakilan utusan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa di tingkat padukuhan;
- 5) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat termasuk pengkajian isu-isu potensi dan masalah Desa, termasuk ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana.
- 6) Penyusunan rancangan RPJM-Desa dengan menyelaraskan arah kebijakan pemerintah desa, pengkajian keadaan desa dan pembahasan serta pengolahan hasil penggalan gagasan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes).
- 7) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- 8) Penyajian naskah rancangan RPJM-Desa untuk dibahas dalam Musyawarah BPD pada tahap awal;
- 9) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8)), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- 10) Setelah mendapat persetujuan BPD pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diatas, maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala

Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

Selanjutnya RPJM-Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan program-program pembangunan di Desa Nogoro-oro selama 6 (enam) tahun ke depan melalui program tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)

TAHUN 2018 - 2024

DESA : NGORO-ORO
 KECAMATAN : PATUK
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ manfaat	Waktu pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5	Th. 6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	6 Paket	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kades	√	√	√	√	√	213.720.000	APBDes	√		
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	6 Paket	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	2.808.000.000	APBDes	√		
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	6 Paket	Terbayarnya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	90.651.600	APBDes	√		

			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)	Desa	6 Paket	Lancarnya beban operasional Pemdes	√	√	√	√	√	√	395.000.000	APBDes	√		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	6 Paket	Terbayarnya tunjangan BPD	√	√	√	√	√	√	244.800.000	APBDes	√		
			6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa	6 Paket	Lancarnya beban operasional BPD	√	√	√	√	√	√	26.500.000	APBDes	√		
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	6 Paket	Tersediaanya insentif RT/RW	√	√	√	√	√	√	61.200.000	APBDes	√		
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	3 Paket	Terpenuhinya kebutuhan sarana perkantoran		√	√	√	√	√	17.600.000	APBDes	√		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	6 Paket	Gedung/kantor lebih nyaman	√	√	√	√	√	√	21.300.000	APBDes	√		
			3	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Unit	Terwujudnya prasarana kantor	√						56.000.000	APBDes	√		
			90	Pengadaan peralatan kerja	Desa	5 Paket	Terpenuhinya kebutuhan alat kerja		√	√	√	√	√	64.500.000	APBDes	√		
			91	Pengadaan mebeleur	Desa	5 Paket	Terpenuhinya prasarana kantor		√	√	√	√	√	9.400.000	APBDes	√		

			92	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Desa	5 Paket	Meubeler yang nyaman/siap pakai		√	√	√	√	√	2.500.000	APBDes	√		
			93	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Desa	1 Unit	Membantu operasional dan pelayanan						√	160.000.000	APBDes	√		
			94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Desa	6 Paket	Kendaraan dinas nyaman/siap pakai	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes	√		
			95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Desa	6 Paket	Peralatan kerja yang terawat dan siap pakai	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	√		
			96	Pengadaan mesin/kartu absensi	Desa	1 Unit	Jam masuk yang tercatat dengan tepat		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
			97	Penyediaan jasa jaminan barang milik desa	Desa	5 Paket	Terbayarnya jaminan barang milik desa		√	√	√	√	√	1.500.000	APBDes	√		
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa	5 Paket	Terpenuhinya administrasi umum dan kependudukan bagi masyarakat		√	√	√	√	√	12.000.000	APBD Kab.	√		√
			2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa	6 Paket	Dokumen Profil Desa yang akurat dan informatif	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		

			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	6 Paket	Arsip desa yang tertata dan terdokumen dengan baik	√	√	√	√	√	√	11.750.000	APBDes	√		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa	3 Paket	Masyarakat sadar pentingnya dokumen kependudukan		√	√	√	√	√	1.950.000	APBDes dan APBD Kab.	√		√
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	2 Paket	Terpetakannya kemiskinan desa		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
			90	Penyusunan monografi desa	Desa	6 Paket	Dokumen monografi desa yang informatif	√	√	√	√	√	√	3.600.000	APBDes	√		
			91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Desa	6 Paket	Terdatanya RTM dengan benar	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes	√		
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	6 Paket	Dokumen yang transparan dan partisipatif	√	√	√	√	√	√	81.570.000	APBDes	√		
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	6 Paket	Tersempainya usulan/aspirasi masyarakat	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes	√		

3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	Desa	6 Paket	Dokumen perencanaan yang partisipatif dan sistematis	√	√	√	√	√	√	15.100.000	APBDes	√		
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	6 Paket	Dokumen keuangan yang transparan dan akuntabel	√	√	√	√	√	√	26.525.000	APBDes	√		
5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	6 Paket	Aset yang dikelola dan terdokumen dengan baik	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	√		
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa	6 Paket	Dokumen peraturan yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√	33.000.000	APBDes	√		
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	6 Paket	Informasi/ laporan yang transparan dan akuntabel	√	√	√	√	√	√	5.700.000	APBDes	√		
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	6 Paket	Mudahnya mendapatkan informasi tentang desa	√	√	√	√	√	√	27.000.000	APBDes	√		

				9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga, dll)	Desa	3 Paket	Kesulitan/ permasalahan desa dengan pihak lain mudah diatasi		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.		√	√
				10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa	2 Paket	Terpilihnya BPD dan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	85.000.000	APBDes dan APBD Kab.	√		
				11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	1 Paket	Tercapainya prestasi kontingen		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
				90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Desa	6 Paket	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	√	√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		
				91	Pengisian perangkat desa	Desa	3 Paket	Dukuh Salaran, Dukuh Gembyong dan Kasi. Kesejahteraan yang devinitif	√				√	√	54.000.000	APBDes	√		

			92	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Desa	3 Paket	Penghargaan Duku Salaran, Dukuh Gembyong dan Kasi. Kesejahteraan	√				√	√	22.000.000	APBDes	√		
			94	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Desa	1 Paket	Dokumen pemanfaatan tata ruang yang baik		√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes	√		
			95	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Desa	3 Paket	Terpenuhinya seragam/pakaian dinas		√	√	√	√	√	17.000.000	APBDes	√		
			96	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Desa	5 Paket	Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan		√	√	√	√	√	2.500.000	APBDes	√		
	5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Desa	Desa	61 Bidang	Tanah kas desa, lungguh, pengaremarem yang bersertifikat			√	√	√	√	15.250.000	APBD Prov. dan APBD Kab.	√		√
			2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	4 Paket	Tanah yang ter registrasi/ ter administrasi kan			√	√	√	√	12.000.000	APBD Prov. dan APBD Kab.	√		√

3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	2.500 bidang	Terbitnya dokumen Pertanahan/ sertifikat milik masyarakat			√	√	√	√	375.000.000	Swadaya APBDes	√		
4	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	1 Paket	Masalah pertanahan terselesaikan		√	√	√	√	√	2.500.000	APBDes	√		
5	Penyuluhan Pertanahan	Desa	1 Paket	Pemahaman masyarakat tentang pertanahan meningkat		√	√	√	√	√	5.000.000	APBD Kab.	√		√
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Paket	PBB yang teradministrasi		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa	1 Paket	Tertatanya batas tanah dengan benar		√	√	√	√	√	8.000.000	APBDes	√		
90	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya pengganti tanah desa	√	√	√	√	√	√	3.570.258.600	APBD Kab. dan APBD Prov.	√		√
91	Sertifikasi tanah milik desa	Desa	1 Paket	Tersertifikat nya tanah milik desa					√	√	2.500.000	APBDes	√		
92	Pengadaan tanah milik desa	Desa	1 Paket	Bertambahnya aset tetap					√	√	500.000.000	APBDes	√		

				93	Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	Desa	1 Paket	Tidak ada konflik pertanahan			√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
				94	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Desa	6 Paket	Pelunasan PBB tepat waktu	√	√	√	√	√	√	22.950.000	APBDes	√		
				95	Perapatan patok batas desa	Desa	1 Paket	Memperjelas batas wilayah desa		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes dan APBD Kab.	√		√
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	6 Paket	Terselenggaranya PAUD/TK	√	√	√	√	√	√	178.800.000	APBDes	√		
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)	Desa	2 Paket	Tersedianya APE		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√		
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	3 Paket	Kesadaran dan pendidikan masyarakat meningkat		√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		
				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	5 Paket	Perpustakaan yang nyaman		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
				5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	2 Paket	PAUD/TK lebih nyaman		√	√	√	√	√	8.000.000	APBDes	√		

6	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	2 Paket	Terwujudnya APE PAUD/TK		√	√	√	√	√	40.000.000	APBDes	√		
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	2 Paket	Perpustakaan yang lebih representatif		√	√	√	√	√	125.000.000	APBDes	√		
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa	6 Paket	Perpustakaan dikelola dengan baik	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√		
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	3 Paket	Terbinanya sanggar seni dan belajar		√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes	√		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	3 Paket	Meningkatnya motivasi siswa dalam pendidikan		√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes	√		
90	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya gedung PAUD/TK		√	√	√	√	√	200.000.000	APBDes	√		
91	Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa	1 Paket	Gedung PAUD/TK yang nyaman		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
92	Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	Desa	3 Paket	Meningkatnya motivasi belajar		√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes	√		
93	Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara	Desa	1 Paket	Terdatanya warga putus sekolah dan buta huruf/aksara		√	√	√	√	√	2.250.000	APBDes	√		
94	Pembinaan taman bacaan masyarakat	Desa	2 Paket	Meningkatnya minat baca		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		

			2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa	5 Paket	Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
					2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa	6 Paket	Terpenuhinya kegiatan posyandu	√	√	√	√	√	√	86.300.000	APBDes	√		
					3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa	4 Paket	Pemahaman terhadap kesehatan meningkat		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
					4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	6 Paket	Lancarnya kegiatan desa siaga	√	√	√	√	√	√	10.200.000	APBDes	√		
					5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa	2 Paket	Remaja dengan gaya hidup sehat dan jiwa sosial		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
					6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	3 Paket	Terbinanya tumbuh kembang balita dan anak		√	√	√	√	√	45.000.000	APBDes	√		
					7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	2 Paket	Kesehatan tradisional terlatih		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
					8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	3 Paket	Lancarnya penyelenggaraan posyandu		√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes	√		

9	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	3 Paket	Lancarnya penyelenggara an posyandu		√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes	√		
90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa	6 Paket	Lancarnya kegiatan posbindu	√	√	√	√	√	√	105.180.000	APBDes	√		
91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Desa	3 Paket	Meningkatnya kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	√		
92	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Desa	2 Paket	Meningkatnya produksi Toga		√	√	√	√	√	11.000.000	APBDes	√		
93	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Desa	2 Paket	Pencegahan berkembangnya wabah		√	√	√	√	√	11.000.000	APBDes	√		
94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Desa	5 Paket	Meningkatkan gizi balita		√	√	√	√	√	17.500.000	APBDes	√		
95	Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	Desa	3 Paket	Data kesehatan yang akurat		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Desa	2 Paket	Kesadaran ber KB meningkat		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
97	Surveilans berbasis masyarakat	Desa	2 Paket	Kemandirian masyarakat terhadap kasus kesehatan meningkat		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
98	Insentif kader kesehatan/KB	Desa	6 Paket	Terbayarnya insentif kader	√	√	√	√	√	√	74.520.000	APBDes	√		
99	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	2 Paket	Tertanggulangi wabah penyakit		√	√	√	√	√	40.000.000	APBDes	√		

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan jalan desa	Desa	5 Paket	Jalan yang lebih baik		√	√	√	√	√	75.000.000	APBDes	√		
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	5 Paket	Jalan yang lebih baik		√	√	√	√	√	55.000.000	APBDes	√		
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	7 Paket	Mempermudah akses ke lahan pertanian		√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes	√		
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa	5 Paket	Kuatnya jembatan		√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√		
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa	5 Paket	Prasarana jalan yang baik		√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes	√		
		6	Pemeliharaan Gedung/Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	3 Paket	Kenyamanan gedung meningkat		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√		
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	2 Paket	Makam/situs lebih asri		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa	2 Paket	Tidak terjadi kerusakan dini		√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes	√		
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	2 Paket	Gapura yang baik		√		√		√	5.000.000	APBDes	√		
		10	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Desa	5 Paket	Sarana jalan yang memadai		√	√	√	√	√	1.500.000.000	APBDes	√		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	5 Paket	Mudahnya akses jalan lingkungan		√	√	√	√	√	400.000.000	APBDes	√		
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa	5 Paket	Mempermudah akses ke lahan pertanian		√	√	√	√	√	300.000.000	APBDes	√		

13	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Desa	5 Paket	Jembatan yang lebih kuat dan kokoh		√	√	√	√	√	500.000.000	APBDes	√		
14	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa	6 Paket	Sarana jalan yang memadai	√	√	√	√	√	√	1.700.000.000	APBDes	√		
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	3 Paket	Terwujudny Balai yang baik		√	√	√	√	√	120.000.000	APBDes	√		
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	2 Paket	Terwujudnya pemakaman/ situs		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	3 Paket	Mudah mengenali wilayah dan sebaran kesejahteraan penduduk desa		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan		√	√	√	√	√	40.000.000	APBDes	√		
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Desa	2 Paket	Berfungsinya kembali embung			√	√	√	√	250.000.000	APBDes	√		
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya gapura		√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√		

			90	Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	Desa	2 Paket	Terwujudnya penampungan air komunal		√	√	√	√	√	65.000.000	APBDes	√		
			91	Pemeliharaan bangunan penampung air komunal	Desa	3 Paket	Tidak terjadi kerusakan dini		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
			92	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya pemakaman.		√	√	√	√	√	35.000.000	APBDes	√		
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa	2 Paket	Tersedianya rumah layah huni bagi GAKIN		√	√	√	√	√	500.000.000	APBN, APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√	
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa	1 Paket	Pemanfaatan sumur resapan lebih optimal		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√			
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Desa	4 Paket	Menjaga kebersihan air sumur		√	√	√	√	√	8.928.000	APBDes	√			
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Desa	2 Paket	Lancarnya air bersih ke rumah tangga		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√			
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa	3 Paket	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan, produktivitas masyarakat		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√			
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll	Desa	1 Paket	Tidak terjadi kerusakan dini		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√			

			7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	5 Paket	Tidak terjadi kerusakan dini		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
			8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	2 Paket	Tidak terjadi kerusakan dini		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
			9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1 Paket	Tidak terjadi kerusakan dini		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
			10	Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Resapan	Desa	2 Paket	Tersedianya air di musim kemarau		√	√	√	√	√	7.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
			11	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Desa	2 Paket	Mudahnya mendapatkan air bersih		√	√	√	√	√	500.000.000	APBN, APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
			12	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Desa	2 Paket	Lancarnya aliran air bersih ke rumah tangga	√	√	√	√	√	√	55.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
			13	Pembangunan/Rehabilitasi Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa	2 Paket	Terwujudnya kualitas kesehatan, pendidikan, produktivitas masyarakat		√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
			14	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)	Desa	1 Paket	Mempermudah akses mck bagi pendatang		√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes	√		

		15	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	5 Paket	Terwujudnya lingkungan bersih dan sehat		√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		16	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	1 Paket	Mengurangi pencemaran lingkungan		√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		17	Pembangunan/Rehabilitasi Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1 Paket	Tersediannya area bermain		√	√	√	√	√	250.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		90	Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	Desa	2 Paket	Memudahkan mendapatka air bersih		√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		91	Pemberian stimulan jamban sehat	Desa	6 Paket	Tersediannya jamban sehat bagi RTM	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		92	Pengelolaan sampah desa/permukiman	Desa	5 Paket	Kesehatan masyarakat meningkat		√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		93	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Desa	3 Paket	Meningkatnya prilaku hidup sehat	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
		94	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Desa	5 Paket	Sampah terpilah dengan baik		√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa	1 Paket	Tejanya ekosistem dan resapan air		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√

			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa	2 Paket	Lestarnya lingkungan hidup		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
			3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa	2 Paket	Meningkatnya kesadaran tentang LH dan Kehutanan		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
			90	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Desa	3 Paket	Melindungi kekayaan ekosistem air		√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		
			91	Pengelolaan Wana Desa	Desa	1 Paket	Terjagannya populasi tanaman hutan		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
			92	Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	Desa	2 Paket	Terlindungnya sumber air dan lingkungan		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
			93	Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan	Desa	3 Paket	Meningkatnya kapasitas kelompok		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
			94	Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	Desa	2 Paket	Nyaman dalam aktifitas sehari hari		√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes	√		
	6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	5 Paket	Terhindar dari resiko kecelakaan dan tersesat arah		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa	6 Paket	Informasi desa mudah didapat	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	2 Paket	Mempermudah akses internet	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDes	√		

		90	Pengelolaan radio komunikasi milik desa	Desa	2 Paket	Komunikasi dan informasi lebih mudah		√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes	√		
		91	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	Desa	5 Paket	Mengurangi resiko kecelakaan		√	√	√	√	√	29.200.000	APBDes	√		
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Desa	2 Paket	Kerusakan dini sarana dan prasarana terhindari		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Desa	2 Paket	Terwujudnya sarana prasarana energi alternatif		√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes	√		
		90	Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif	Desa	1 Paket	Meningkatnya pengguna energi alternatif		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	1 Paket	Obyek wisata yang nyaman		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	2 Paket	Wisatawan lebih nyaman		√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes	√		
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	3 Paket	Ekonomi masyarakat meningkat		√	√	√	√	√	75.000.000	APBDes	√		

				90	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Desa	1 Paket	Peningkatan kesejahteraan masyarakat		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
				91	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	Desa	3 Paket	Bertambahnya wawasan pokdarwis		√	√	√	√	√	4.500.000	APBDes	√		
				92	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	Desa	1 Paket	Terbayarnya retribusi		√	√	√	√	√	2.000.000	APBD Kab.	√		
				93	Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	Desa	1 Paket	Memberikan kenyamanan bagi perjalanan jauh		√	√	√	√	√	200.000.000	APBDes	√		
				94	Pemeliharaan Rest Area Milik Desa	Desa	1 Paket	Mengurangi kerusakan dini tempat istirahat		√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes	√		
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll)	Desa	2 Paket	Koordinasi petugas ronda lebih mudah		√	√	√	√	√	66.000.000	APBDes	√		
				2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa	6 Paket	Linmas yang terlatih dan tangguh		√	√	√	√	√	59.000.000	APBDes	√		

				3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa	3 Paket	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban		√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
				4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	4 Paket	Masyarakat tanggap bencana		√	√	√	√	√	19.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
				5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Unit	Koordinasi terhadap kejadian bencana lebih mudah		√	√	√	√	√	55.000.000	APBDes	√		
				6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	2 Paket	Masalah hukum segera terselesaikan		√	√	√	√	√	40.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
				7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	4 Paket	Kesadaran hukum meningkat		√	√	√	√	√	15.500.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
				90	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Desa	2 Paket	Lembaga desa yang siapsiaga bencana		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
				91	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Desa	1 Paket	Lebih semangat menjaga kamtibmas		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
				92	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Desa	3 Paket	Mempermudah menghadapi bencana		√	√	√	√	√	75.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√

			93	Pembinaan Jaga Warga	Desa	3 Paket	Optimalnya nilai luhur dan pranata sosial masyarakat		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
			94	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Desa	2 Paket	Terhindarnya peredaran dan penggunaan Narkoba		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
			95	Pengadaan seragam Satlinmas	Desa	1 Paket	Linmas yang lebih rapi		√	√	√	√	√	14.440.000	APBDes	√		
			96	Pembinaan dan pengembangan paralegal desa	Desa	1 Paket	Paralegal yang kompeten		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
			97	Pengembangan desa/keompok masyarakat sadar hukum	Desa	3 Paket	Kadarkum yang tangguh		√	√	√	√	√	8.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	6 Paket	Meningkatnya kemampuan grup kesenian	√	√	√	√	√	√	69.400.000	APBDes	√		
			2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	3 Paket	Grup kesenian yang kompetitif		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa	6 Paket	Meningkatnya nasionalisme dan keimanan	√	√	√	√	√	√	90.120.000	APBDes	√		
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Desa	2 Paket	Mencegah kerusakan dini		√	√	√	√	√	13.000.000	APBDes	√		

			5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa	2 Paket	Aktifitas keagamaan/kebudayaan lebih nyaman		√	√	√	√	√	55.000.000	APBDes	√		
			90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Desa	6 Paket	Kegiatan keagamaan lebih bersemangat	√	√	√	√	√	√	94.000.000	APBDes	√		
			91	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Desa	3 Paket	Aktifitas sosial dan agama seimbang		√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		
			92	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Desa	1 Paket	Lestarnya adat tradisi		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
			93	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Desa	1 Paket	Terbinanya sanggar seni dan budaya		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
			94	Pelaksanaan sunatan massal	Desa	2 Paket	Terbantunya warga kurang mampu		√	√	√	√	√	60.000.000	APBDes	√		
			95	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Desa	1 Paket	Terbinanya lembaga pelestari adat		√	√	√	√	√	2.000.000	APBDes	√		
			96	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Desa	1 Paket	Desa budaya yang baik		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	6 Paket	Meningkatkan prestasi pemuda	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes	√		

				2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	2 Paket	Pemuda yang terlatih dan mandiri		√	√	√	√	√	5.300.000	APBDes	√		
				3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	6 Paket	Terpantaunya pemuda/atlit berbakat	√	√	√	√	√	√	51.000.000	APBDes	√		
				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa	6 Paket	Mencegah kerusakan dini sarana prasarana olah raga	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APBDes	√		
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	Desa	3 Paket	Nyamannya sarana prasarana olah raga		√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√		
				6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	6 Paket	Karang taruna/klub olah raga lebih maju	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
				90	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Desa	5 Paket	Meningkatkan nasionalisme		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
				91	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya sarana prasarana kegiatan		√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes	√		
				92	Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	Desa	1 Paket	Terhindar dari kerusakan dini		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		

		93	Operasional Karang Taruna	Desa	6 Paket	Lancarnya kegiatan karang taruna	√	√	√	√	√	√	8.400.000	APBDes	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	2 Paket	Lembaga adat yang maju		√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes	√		
2		Pembinaan LPMP dan/atau LPMD	Desa	6 Paket	LPMP/LPMD yang kompeten	√	√	√	√	√	√	17.100.000	APBDes	√			
3		Pembinaan PKK	Desa	6 Paket	Pengurus yang kompeten	√	√	√	√	√	√	20.500.000	APBDes	√			
4		Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	2 Paket	Lembaga Kemasyarakatan yang kompeten		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√			
90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Desa	2 Paket	Terbentuknya LKD	√					√	17.600.000	APBDes	√			
91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa	3 Paket	Terbinanya KPM		√	√	√	√	√	3.330.000	APBDes	√			
92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Desa	6 Paket	Kemiskinan di desa terpetakan	√	√	√	√	√	√	28.116.000	APBDes	√			
93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa	6 Paket	Meningkatnya kebersihan lingkungan	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes	√			
94		Pembinaan RT/RW	Desa	6 Paket	RT/RW yang maju	√	√	√	√	√	√	61.200.000	APBDes	√			
95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	Desa	6 Paket	Lancarnya kegiatan LPMD	√	√	√	√	√	√	8.400.000	APBDes	√			
96	Operasional PKK	Desa	6 Paket	Lancarnya kegiatan PKK	√	√	√	√	√	√	10.200.000	APBDes	√				

IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	1 Paket	Kramba/kolam siap pakai		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√			
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya keramba/kolam		√	√	√	√	√	25.000.000	APBDes	√			
				5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa	3 Paket	Terpenuhinya kebutuhan bibit dan pakan		√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes	√			
				6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Desa	2 Paket	Kualitas dan hasil ikan meningkat		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√			
				90	Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	Desa	1 Paket	Perekonomian meningkat		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√			
				91	Pembinaan kelompok perikanan darat	Desa	2 Paket	Kelompok yang mandiri		√	√	√	√	√	4.450.000	APBDes	√			
				94	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	Desa	1 Paket	Mengatasi kesulitan pakan		√	√	√	√	√	2.000.000	APBDes	√			
		2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa	3 Paket	Pengolahan tanaman pangan lebih mudah		√	√	√	√	√	22.500.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√			√
				2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa	3 Paket	Motifasi berternak meningkat		√	√	√	√	√	161.500.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√			√
				3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa	1 Paket	Terhindar dari kelaparan		√	√	√	√	√	50.000.000	APBDes	√			
				4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	1 Paket	Lancarnya air untuk irigasi		√	√	√	√	√	7.500.000	APBDes	√			

		5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	2 Paket	Produksi pertanian/ peternakan meningkat		√	√	√	√	√	7.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		90	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	Desa	1 Paket	Pengairan persawahan		√	√	√	√	√	200.000.000	APBDes	√		
		91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Desa	2 Paket	Meningkatnya ekonomi petani/peternak		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
		92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/ Gapoktan	Desa	6 Paket	Gapoktan dan klomtan lebih maju	√	√	√	√	√	√	17.650.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		93	Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	Desa	1 Paket	Ketersediaan logistik/ pangan		√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes	√		
		94	Pemeliharaan lumbung desa	Desa	1 Paket	Mencegah kerusakan dini		√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes	√		
		95	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Desa	2 Paket	Tersediannya pupuk organik		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
		96	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Desa	1 Paket	Tersediannya pakan ternak		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	3 Paket	Kompetensi meningkat		√	√	√	√	4.500.000	APBDes	√		
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	3 Paket	Kompetensi meningkat		√	√	√	√	√	12.000.000	APBDes	√		
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	2 Paket	Kapasitas meningkat		√	√	√	√	√	9.000.000	APBDes	√		

4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	2 Paket	Perempuan trampil dan inovatif		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
		2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	2 Paket	Terpenuhi hak-hak anak		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa	6 Paket	Penyandang difabel yang mandiri	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	√		
		90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Desa	2 Paket	Anak lebih nyaman dalam beraktifitas		√	√	√	√	√	15.000.000	APBDes	√		
		91	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa	3 Paket	Terhindarnya ibu dari kematian dini		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
		92	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Desa	1 Paket	Terbinanya bakat dan prestasi		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
		93	Penyelenggaraan festival/ pagelaran seni budaya untuk anak	Desa	2 Paket	Anak cinta akan seni budaya		√	√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
		94	Pembinaan ketahanan keluarga	Desa	1 Paket	Terwujudnya keluarga bahagia		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
		95	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Desa	2 Paket	Berkembangnya potensi kelompok		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		
		96	Penyuluhan/ pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Desa	3 Paket	Remaja tidak salah langkah		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
		97	Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	Desa	1 Paket	Terhindar dari human trafficking		√	√	√	√	3.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√	

		98	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Desa	4 Paket	Mencegah tindakan KDRT		√	√	√	√	√	10.350.000	APBDes	√		
		99	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Desa	2 Paket	Terwujudnya pola asuh dan perkembangan anak dengan benar		√	√	√	√	√	4.000.000	APBDes	√		
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	2 Paket	Koperasi/ UMKM yang baik		√	√	√	√	√	4.500.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	5 Paket	Meningkatnya ketrampilan masyarakat		√	√	√	√	√	75.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa	1 Paket	Terwujudnya percepatan ekonomi masyarakat		√	√	√	√	√	20.000.000	APBDes	√		
		90	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Desa	2 Paket	Tereksposnya produk usaha masyarakat		√	√	√	√	√	6.000.000	APBDes	√		
		91	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Desa	1 Paket	Berkembangnya produk usaha masyarakat		√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	3 Paket	Pengelola BUMDesa yang profesional		√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	√		

			90	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	Desa	1 Unit	Terwujudnya prasarana BUMDesa		√	√	√	√	√	150.000.000	APBDes	√		
		7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	4 Paket	Pasar yang nyaman		√	√	√	√	8.000.000	APBDes	√		
				2	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	1 Paket	Terwujudnya pasar desa		√	√	√	√	350.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
				3	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa	4 Paket	Ekonomi masyarakat meningkat		√	√	√	√	40.000.000	APBDes	√		
				4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Desa	2 Paket	Meningkatnya ketrampilan dan ekonomi masyarakat		√	√	√	√	18.500.000	APBDes	√		
				90	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	Desa	2 Paket	Tertatanya/ rapinya tempat jualan		√	√	√	√	4.000.000	APBDes APBD Kab. & APBD Prov.	√		√
				91	Pengelolaan pasar desa	Desa	5 Paket	Pasar yang representatif		√	√	√	√	10.000.000	APBDes	√		
				92	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Desa	2 Paket	Pengelola pasar yang profesional		√	√	√	√	4.250.000	APBDes	√		
V	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	1	Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Desa	6 Paket	Tertanggulangnya bencana alam	√	√	√	√	√	27.000.000	APBDes	√		

		2	Keadaan Darurat	2	Keadaan Darurat	Desa	6 Paket	Tertunggulangnya bencana sosial	√	√	√	√	√	√	21.600.000	APBDes	√		
		3	Keadaan Mendesak.	3	Keadaan Mendesak	Desa	6 Paket	Tertunggulangnya kejadian luarbiasa/wabah	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	√		
VI	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			1	Penyertaan Modal BUMDesa	Desa	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan modal	√	√					119.000.000	APBDes	√		